

S
338.707
wul
b
c-070796
2009

**KEMAMPUAN KOTA PALEMBANG DALAM
MELAKUKAN PINJAMAN**



Skripsi Oleh :

RETNO WULANDARI

NIM 01053120015

**Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA
TAHUN 2009**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDRALAYA**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

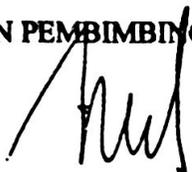
**NAMA : RETNO WULANDARI
NIM : 01053120015
JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN
MATA KULIAH : KEUANGAN DAERAH
JUDUL : KEMAMPUAN KOTA PALEMBANG DALAM
MELAKUKAN PINJAMAN**

PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI

TANGGAL PERSETUJUAN

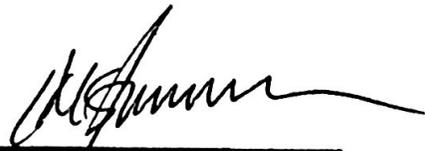
DOSEN PEMBIMBING

Tanggal 7 April 2009 Ketua :



**Dr. Azwardi, SE, M.Si
NIP 132050494**

Tanggal 7 April 2009 Anggota :



**Drs. M. Syirod Saleh, M.si
NIP 131412510**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDRALAYA**

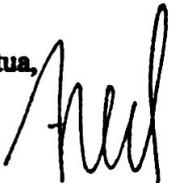
TANDA PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

**NAMA : RETNO WULANDARI
NIM : 01053120015
JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN
MATA KULIAH : KEUANGAN DAERAH
JUDUL : KEMAMPUAN KOTA PALEMBANG DALAM
MELAKUKAN PINJAMAN**

Telah diuji di depan panitia ujian komprehensif pada tanggal 5 Mei 2009 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

**Panitia Ujian Komprehensif
Inderalaya, 5 Mei 2009**

Ketua,



**Dr. Azwardi, SE, M.Si
NIP 132050494**

Anggota,



**Drs. M. Syirod Saleh, M.si
NIP 131412510**

Anggota,



**Imam Asngari, SE, M.Si
NIP 132300734**

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



**Prof. Dr. Taufiq Marwa, M.Si
NIP 132050493**

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Satu saja ungkapan rasa syukur dilambungkan ke surga, nilainya sama dengan rangkaian doa yang paling sempurna.

Gotthold Ephraim Lessing

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- ⌚ *Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya.*
- ⌚ *Bapak Zainal Abidin dan Ibu Yusniarni tercinta.*
- ⌚ *Septi Arniza dan Triana Kartika, My sista*
- ⌚ *My Luv of A Lifetime; bie-bie*
“U’re all I need beside me”

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas izin, rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagaimana mestinya. Tak lupa penulis haturkan shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pembimbing umat, Rasulullah Muhammad saw, karena berkat beliaulah kita dapat berada di jalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini berjudul “Kemampuan Kota Palembang Dalam Melakukan Pinjaman”. Judul tersebut dilatarbelakangi karena ketertarikan penulis untuk mengetahui kemampuan kota Palembang dalam melakukan pinjaman, selain itu skripsi ini dibuat untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama tahun 1998/1999-2007 Kota Palembang memperoleh *Debt Service Coverage Rate/ DSCR* diatas 2,5. Ini artinya kota Palembang dapat melakukan pinjaman. Dari hasil proyeksi, tahun 2008-2012 Kota Palembang juga dapat melakukan pinjaman sebagai alternatif pembiayaan.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan, kesalahan serta keterbatasan penulis dalam menyusun skripsi ini, oleh karena itu kepada Allah SWT penulis mohon ampun dan kepada para pembaca penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar menjadi pelajaran dalam penulisan-penulisan berikutnya. Semoga semua ini dapat bermanfaat bagi kita semua, amin.

Palembang, April 2009

Retno Wulandari

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T. karena atas rahmat dan hidayahNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kemampuan Kota Palembang Dalam Melakukan Pinjaman”. Sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung baik moril maupun material dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Badia Perizade, MBA, Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. H. Syamsurijal, AK, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Terima kasih sudah menjadi pembimbing akademik selama kuliah.
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, M.Si, Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Azwardi, SE, M.Si selaku Pembimbing I Skripsi yang banyak membantu penulis dalam penyusunan dari awal hingga terselesainya skripsi ini.
5. Bapak Drs. M. Syirod Saleh, M.Si selaku Pembimbing II Skripsi yang memberikan bimbingan bagi penulis.
6. Bapak Imam Asngari, SE, M.Si sebagai dosen tamu yang memberikan banyak masukan untuk skripsi ini. Bapak sudah saya anggap sebagai pembimbing III skripsi ini,,makasie atas keikhlasannya dalam membimbing penulis menyelesaikan proyeksi...
7. Semua Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Semoga ilmu yang penulis serap dapat teraplikasi dengan baik.
8. Ayahku “Zainal Abidin, SE” yang sabar *nganterin ngeprint, nungguin* skripsi ini rampung. Ibuku “Yusniarni” yang selalu mendoakan kesuksesanku. *Thanks for all,,,*
9. Makasie Mama Ita, Mama Anti, Mama Yok, dan seluruh tante-tanteku (khususnya tante Ten yang sudah kasih pinjaman printer hehe...☺) yang selalu peduli dengan studiku,,,

10. Mbakku "Septi Arniza"; makasie sudah bikin terpacu...semoga cepat lulus,,,sadarlah cuy!!!,,,adikku "Triana Kartika"; yang *ngeback-up* urusan-urusan,,,makasie y (tenang be geg dpt duit tip hehe...☺)
11. Bie-bie "Muhammad Fikri" yang setia jadi tong sampah kata-kata mi"...selalu sabar nganterin+nungguin mi" nemuin dosen,,,*thanks your spirit*,,,
12. *My Best Frend* "Selly Diana"...makasie dukungan,,semangat,,n nasehatmu. Dari Taman kanak-kanak sampai sekarang jadi *my soulmate*.....*God bless u*,,,tetep semangat...nanana,,,ngrumput,,,makan-makan hehe....✂
13. Icha, Osa, Nija n Fandi makasie da jadi sahabatku dikampus,,,tempat bertanya (diutamakan saat ujian hehe.... ☺), minta nasehat, curhat dll....
14. Thea, Yeni yang jadi tempat bertanya,,,makasie...all budak kade lain semoga cepet nyusul (Sandi,Rahmad,Ahmad,Rien,Aditia dll)
15. Rombongan Yudisium 91 EP 05; Agha, Riska, Desi "kiting", Ridha, Suharti, Uli', Isna', Fitri, Yuyun, Nova, Gustri, Evi, Wiwid, Maya.....*Congratulation!!!*..... Untuk Tmn" yang yudisium duluan (Renov, Reros, Desi Lia, Ina', Maslia, Lilis, Juliani, Minggu) makasie info-infonya....
16. All *My frend* Deco 05; Efril, Lia A, Kokom, Editha, Ida, Ira, Melisa, Deka, Hesti, Tika Tomboi, Hendra, Arya, Dirta, John, Yogi "papa", Andika, Anjha, Fajar, Yandi, Ramadhan, Rangga, Heri "Oom", Jenang, Okta, Dedi, Fahrudi, Edward, Adi, Cotlan, Inu', Rayandra.
17. Crew front office Wisata Hotel; K'Icon, K'Momo, Mbak Tanti, Mbak Yuli dll...makasie dukungannya
18. Staf pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang sudah banyak membantu.
19. Seluruh pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu *thanks for all*...

Semoga Allah S.W.T membalas budi baiknya dan berkah kepada kita semua, Amin.

Penulis,

Retno Wulandari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR GRAFIK.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAKSI.....	xiii
ABSTRACT	xiv

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori.....	12
2.1.1. Kemampuan Keuangan Daerah	15
2.1.2. Keuangan Daerah	17
2.1.3. Pinjaman Daerah	18
2.2. Penelitian Terdahulu	27
2.3. Kerangka Pemikiran.....	29

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian.....	31
------------------------------------	----



3.2. Data dan Sumber Data	31
3.3. Teknik Analisis	31
3.4. Batasan Variabel Operasional	36
 BAB IV. GAMBARAN UMUM VARIABEL PENELITIAN	
4.1. Perkembangan Penerimaan Daerah.....	38
4.1.1 Pendapatan Asli Daerah	38
4.1.2 Dana Perimbangan	39
4.1.3 Lain-lain Penerimaan Yang Sah.....	41
4.2. Perkembangan Pengeluaran Daerah.....	44
 BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.1. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Melakukan Pinjaman Daerah	47
5.2. Besarnya Pinjaman Yang Akan Dilakukan Tahun Anggaran 2008 s.d 2012	50
5.2.1 Metode Kuadrat Terkecil	50
5.2.2 Metode Rata-rata Pertumbuhan Setiap Tahun	55
 BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1. Kesimpulan	61
6.2. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	65

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1.	Pertumbuhan dan Kontribusi Penerimaan Dana Perimbangan Kota Palembang Tahun 1998-2007.....	4
TABEL 1.2.	Belanja Wajib Pemerintah Daerah Kota Palembang Tahun 1998 s/d 2007	6
TABEL 1.3.	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun 1998-2007	8
TABEL 4.1.	Realisasi Penerimaan Daerah Otonom Kota Palembang Tahun 1998 s/d 2007	42
TABEL 4.2.	Pertumbuhan dan Kontribusi Realisasi Penerimaan Daerah Otonom Kota Palembang Tahun 1998 s/d 2007	44
TABEL 4.3.	Pertumbuhan dan Kontribusi Belanja Wajib Pemerintah Daerah Kota Palembang Tahun 1998 s/d 2007.....	46
TABEL 5.1.	Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palembang di Dalam Melakukan Pinjaman Tahun 1998-2007	48
TABEL 5.2.	Batas Maksimum Pinjaman Pemerintah Daerah Kota Palembang Tahun 1998 s/d 2007	50
TABEL 5.3.	Estimasi Kuadrat Terkecil.....	51
TABEL 5.4.	Proyeksi Penerimaan Daerah Kota Palembang (<i>The Least Square Method</i>)Tahun 2008 s/d 2012.....	52
TABEL 5.5.	Proyeksi Belanja Wajib Pemerintah Daerah Kota Palembang (<i>The Least Square Method</i>) Tahun 2008 s/d 2012.....	52
TABEL 5.6.	Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kota Palembang (<i>The Least Square Method</i>) Tahun 2008 s/d 2012	53
TABEL 5.7.	Estimasi Penerimaan Daerah Otonom Kota Palembang Metode Rata-rata Pertumbuhan Tahun 2008 s/d 2012.....	56
TABEL 5.8.	Estimasi Belanja Wajib Daerah Otonom Kota Palembang Metode Rata-rata Pertumbuhan Tahun 2008 - 2012	56
TABEL 5.9.	Estimasi Besarnya Pinjaman Kota Palembang Metode Rata-rata Pertumbuhan Tahun 2008 - 2012.....	57

TABEL 5.10. Penerimaan Daerah Kota Palembang Tahun 2008 s/d 2012.....	59
TABEL 5.11. Belanja Wajib Pemerintah Daerah Kota Palembang Tahun 2008 s/d 2012	60

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1. Kerangka Pikir	29
---	----

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 5.1. Proyeksi Penerimaan, Belanja dan Pinjaman Kota Palembang Tahun 2008-2012	54
GRAFIK 5.2. Estimasi Penerimaan, Belanja dan Pinjaman Kota Palembang Tahun 2008-2012	58

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. Realisasi Pengeluaran Daerah Otonom Kota Palembang Tahun 1998 s/d 2007.....	65
LAMPIRAN 2. Trend Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang Tahun 1998-2012	66
LAMPIRAN 3. Trend Dana Perimbangan di Kota Palembang Tahun 1998-2012	67
LAMPIRAN 4. Trend Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah di Kota Palembang Tahun 1998-2012	68
LAMPIRAN 5. Trend Belanja Rutin di Kota Palembang Tahun 1998-2012.....	69
LAMPIRAN 6. Trend Belanja Pembangunan di Kota Palembang Tahun 1999-2012	70
LAMPIRAN 7. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah	71
LAMPIRAN 8. Proyeksi Dana Perimbangan	72
LAMPIRAN 9. Proyeksi Lain-lain Pendapatan yang Sah.....	73
LAMPIRAN 10. Proyeksi Pengeluaran Rutin	74
LAMPIRAN 11. Proyeksi Pengeluaran Pembangunan	75

Kemampuan Kota Palembang Dalam Melakukan Pinjaman

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan mengetahui kemampuan kota Palembang dalam melakukan pinjaman dan mengetahui batas maksimum pinjaman yang boleh dilakukan serta memproyeksikan pinjaman yang bisa diperoleh pemerintah daerah kota Palembang tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder runtut waktu (*time series*). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif mengenai analisis kemampuan keuangan daerah kota Palembang dan bersifat kuantitatif dalam menghitung rasio kemampuan keuangan daerah (*Debt Service Coverage Rate/ DSCR*) dan menghitung batas maksimum pinjaman sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005.

Berdasarkan hasil pembahasan, diketahui bahwa selama tahun anggaran 1998-2007 kontribusi APBD kota Palembang terbesar tidak berasal dari PAD, melainkan berasal dari dana perimbangan. Adanya dana perimbangan membuat kota Palembang memiliki dana netto yang cukup besar dan dapat dipergunakan untuk membayar angsuran pinjaman beserta kewajiban lain yang menyertainya. Pada tahun 1998-2007 nilai DSCR kota Palembang telah memenuhi standar yang ditetapkan, ini berarti bahwa kota Palembang bisa melakukan pinjaman. Dengan menggunakan metode kuadrat terkecil (*the least square*) dan metode rata-rata pertumbuhan setiap tahun, kota Palembang dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 juga bisa melakukan pinjaman.

Kata Kunci : Pinjaman Daerah, Debt Service Coverage Rate, Batas Maksimum Pinjaman



The Capability of Palembang City in to Taking a Loan

ABSTRACT

The purpose of the research to show the capability of Palembang in to taking a loan and knowing the possible maximum limit of loan and forecasting to the loan that available to be gained by regional government of Palembang city year 2008 to 2012. The data used in this research is time series secondary data. Technical analysis is by using descriptive analysis to analyze the financial capability of Palembang city and also by using quantitative analysis in counting *Debt Service Coverage Rate/ DSCR* ratio of regional's financial capability.

The result, along budgeting period 1998 – 2007, the biggest contributor actual receipts and expenditures of municipality government Palembang is not from local government original receipt, but comes from balanced budget. The availability of balanced budget makes Palembang able to have quite big nett funds and can be used to pay the credit payment also other necessities within. In 1998 – 2007, the value of Palembang's DSCR has been fulfilled the determined standart, means that Palembang able to have a loan. By using the least square method, and growth average per year, from year 2008 to 2012 Palembang also able to have a loan.

Keyword : *Local Borrowing, Debt Service Coverage Rate, Maximum Limit of Loan*



BAB I PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Perubahan yang cepat di bidang ekonomi, sosial dan politik dalam era reformasi ini, memiliki implikasi terhadap percepatan perubahan perilaku masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tuntutan keinginan adanya transparansi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, demokratisasi dalam pengambilan keputusan, pemberian pelayanan oleh pemerintah yang lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat dan penerapan hukum secara konsekuen. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa Pinjaman Daerah merupakan salah satu sumber Penerimaan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, yang dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2005)

Pinjaman Daerah merupakan alternatif sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau untuk menutup kekurangan kas yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan inisiatif dan kewenangan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. (Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2005).

Dana Pinjaman merupakan pelengkap dari sumber-sumber penerimaan Daerah yang ada dan ditujukan untuk membiayai pengadaan prasarana Daerah atau harta tetap lain yang berkaitan dengan kegiatan yang bersifat meningkatkan penerimaan yang dapat digunakan untuk mengembalikan pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat. Selain itu, Daerah dimungkinkan pula melakukan pinjaman dengan tujuan lain, seperti mengatasi masalah jangka pendek yang berkaitan dengan arus kas Daerah. Besaran Pinjaman Daerah dalam pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kemampuan Daerah karena dapat menimbulkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun-tahun berikutnya, sehingga perlu didukung dengan ketrampilan perangkat Daerah dalam mengelola Pinjaman Daerah. (Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2005)

Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumahtangganya sendiri. Masalah keuangan merupakan masalah penting dalam setiap kegiatan pemerintah di dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah karena tidak ada kegiatan pemerintah yang tidak membutuhkan biaya, selain itu faktor keuangan ini merupakan faktor penting di dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Kemampuan daerah yang dimaksud dalam pengertian tersebut adalah sampai seberapa jauh daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhannya tanpa harus selalu menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi Pemerintah Pusat.

Masalah keuangan daerah, perimbangan pembiayaan pemerintah pusat dan daerah dengan pendapatan yang secara luas digali sendiri untuk mencukupi kebutuhan sendiri masih mempunyai kelemahan sehingga keterbatasan dalam potensi penerimaan daerah tersebut bisa menjadikan ketergantungan terhadap transfer pusat. Pemerintah Daerah selama ini memiliki keterbatasan pembiayaan dari potensi sendiri (PAD). Selama ini komponen pembiayaan terbesar berasal dari dana transfer dari pusat yaitu Dana Alokasi Umum dan hanya sebagian kecil dari PAD, potensi pembiayaan lain yang belum dikelola yaitu dari pinjaman daerah (Santoso, 2003: 148).

Tabel 1.1 menunjukkan pertumbuhan dan kontribusi dari penerimaan dana perimbangan kota Palembang dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2007. Pada tahun 2000 dana perimbangan mengalami pertumbuhan yang negatif sebesar -8,54%. Pertumbuhan dana perimbangan tertinggi terjadi di tahun 2001 sebesar 183,11%, membaiknya pertumbuhan ditahun ini dapat dilihat dari kontribusinya yang meningkat menjadi 83,98%. Pada tahun 2002 kontribusi dana perimbangan mengalami penurunan menjadi sebesar 45,64%, tidak berbeda dengan pertumbuhannya turun drastis menjadi 18,95%. Pertumbuhan dana perimbangan di tahun 2004 kembali mengalami penurunan menjadi 7,31%. Pada tahun 2007 pertumbuhan dana perimbangan mengalami penurunan menjadi 25,95%, sedangkan kontribusinya meningkat menjadi 82,91%. Tidak dapat dipungkiri bahwa dana perimbangan memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan kota Palembang.

Dapat dilihat dari Tabel 1.1 pertumbuhan dan kontribusi penerimaan dana perimbangan kota Palembang tahun 1998-2007 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Pertumbuhan dan Kontribusi
Penerimaan Dana Perimbangan Kota Palembang
Tahun 1998 - 2007

(dalam ribuan rupiah)

Tahun Anggaran	Dana Perimbangan	Pertumbuhan (%)	Kontribusi (%)
1998	82409454		62.36
1999	125674276	52.50	67.07
2000	114941078	-8.54	66.35
2001	325408811	183.11	83.98
2002	387059754	18.95	45.64
2003	457304356	18.15	78.48
2004	490729761	7.31	78.38
2005	555153260	13.13	69.28
2006	772951769	39.23	82.40
2007	973499814	25.95	82.91

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Selatan Tahun 1998-2007 (diolah)

Rata-rata pertumbuhan dana perimbangan per tahun sebesar 31,2% (lampiran 8). Dari angka persentase tersebut, transfer fiskal yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat masih berpeluang untuk ditingkatkan sehingga memperkuat akan kapasitas fiskal daerah. Disamping hal tersebut di atas, pada umumnya sebagian besar dari jumlah dana perimbangan ($\pm 70\%$), terutama Dana Alokasi Umum (DAU) digunakan oleh daerah untuk membayar gaji pegawai dan keperluan rutin yang lainnya. Oleh karena itu, daerah-daerah berupaya mendapatkan dana pembangunan yang bersumber dari dana pinjaman.

Pembiayaan pembangunan daerah bersumber dari Pos pembiayaan APBD dan Pinjaman yang berasal dari: Lembaga Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Penerbitan obligasi negara, Penerusan pinjaman luar negeri (*two step loan*). Pembiayaan pembangunan yang berasal dari APBD murni sampai tahun ketiga pelaksanaan desentralisasi belum memungkinkan pengalokasiannya secara optimal, karena tuntutan percepatan pembangunan berbagai prasarana daerah memerlukan

penyediaan pembiayaan yang mengejar ketertinggalan pembangunan serta perbaikan dan pemeliharaan sarana pendidikan dan kesehatan telah memperkecil jumlah dana investasi yang menghasilkan pendapatan/ *revenue generating*. (Elmi; 2004: 2)

Biaya pembangunan yang bersumber dari dana pinjaman daerah sampai saat ini masih sulit direalisasikan karena pada periode yang lalu, dana pinjaman semi *soft loan* yang disediakan pemerintah pusat dari RDI (Rekening Dana Investasi), sudah dihentikan. Sedangkan pinjaman luar negeri dan penerbitan obligasi daerah belum diizinkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu pinjaman lembaga perbankan dan non perbankan dalam negeri belum dapat diwujudkan, antara lain karena terkait dengan masalah kepercayaan (*trust*) dan *collateral*. (Elmi, 2004: 2)

Pada awal pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah sekarang ini, pihak perbankan, nonperbankan dan lembaga keuangan lainnya, masih meragukan untuk memberikan dana pinjaman kepada pihak pemerintah daerah. Mereka itu khawatir mengalami kegagalan (*default*) dalam pembayaran kembali pinjaman dana yang diberikan kepada Pemerintah daerah. Masih merupakan hal yang baru bagi mereka, untuk memberikan dana pinjaman yang dijamin dan dibayar dengan dana APBD. Pihak pemerintah daerah sendiri masih sulit untuk meyakinkan pihak *lender* karena diantara anggota eksekutif maupun legislatif daerah itu sering bermasalah. Artinya mereka belum mampu mewujudkan kondisi *good governance* dan *clean government*, sehingga para investor dan masyarakat masih meragukan kinerja kedua lembaga tersebut. (Elmi, 2004: 2)

Sebagian pakar desentralisasi dan otonomi daerah mengemukakan adanya tendensi pemerintah pusat untuk kembali ke sistem sentralisasi. Hal ini bisa diamati dari struktur organisasi di Departemen dan Lembaga Nondepartemen, yang saat ini terdiri dari enam direktorat jenderal. Dengan berlakunya Undang-Undang Otonomi

Daerah, dimana sebagian urusan sudah diserahkan ke daerah, maka seharusnya struktur organisasi Departemen/Lembaga nondepartemen itu dapat "dirampingkan" menjadi dua Direktorat Jenderal saja. Dengan adanya perampingan struktur organisasi di Pemerintah Pusat, akan lebih menghemat belanja APBN. (Elmi, 2004: 3)

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan failitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial (Bastian, 2006: 46). Berikut ini ditampilkan Tabel 1.2 belanja wajib pemerintah daerah kota Palembang tahun 1998-2007:

Tabel 1.2
Belanja Wajib Pemerintah Daerah Kota Palembang
Tahun 1998 s/d 2007

(dalam ribuan rupiah)

Tahun Anggaran	Belanja Rutin	Belanja Pembangunan	Belanja Wajib
1998	85146625	26761649	111908274
1999	116529856	32915019	149444875
2000	112086830	35771994	147858824
2001	116301597	6397505	122699102
2002	335539563	95685420	431224983
2003	556968865	19985284	576954149
2004	592313734	15079675	607393409
2005	637190254	13951747	651142001
2006	483799895	349285844	833085739
2007	753598549	295082395	1048680944

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Selatan Tahun 1998-2007

Tabel 1.2 menunjukkan belanja wajib pemerintah daerah kota Palembang dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2007. Pada tahun 1998 belanja wajib sebesar Rp.111,908 Miliar. Belanja wajib sempat mengalami penurunan menjadi Rp.122,699

Miliar di tahun 2001. Belanja wajib terus mengalami peningkatan hingga akhir tahun pengamatan, tahun 2007 sebesar Rp.1.048,68 Miliar.

Pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan memiliki keuntungan, antara lain dapat mengatasi keterbatasan kemampuan riil atau nyata pada saat ini dari suatu daerah yang sebenarnya potensial dan memiliki kapasitas fiskal yang memadai. Pinjaman dapat mendorong percepatan proses pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah-daerah yang dimaksud. Jenis pinjaman ini merupakan pinjaman jangka panjang. Pinjaman jangka menengah dipergunakan untuk membiayai layanan masyarakat yang tidak menghasilkan penerimaan. Sedang pinjaman jangka pendek digunakan untuk membiayai belanja administrasi umum serta belanja operasional dan pemeliharaan. Untuk mengurangi ketergantungan daerah kepada pusat pinjaman jangka panjang dianggap lebih efektif daripada pinjaman jangka pendek (Santoso, 2003: 148).

Adanya pinjaman daerah ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan di daerah. Menurut Kunarjo (dalam Abdul Halim, 2004: 177) karena kecilnya pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan kebutuhan daerah untuk pembangunan, maka dalam beberapa hal pemerintah daerah memerlukan pinjaman untuk membiayai pembangunan daerah. Kegiatan-kegiatan yang dibiayai melalui pinjaman daerah pada dasarnya merupakan investasi dibidang publik berupa perbaikan dan penambahan infrastruktur social ekonomi. Semakin baik infrastruktur ekonomi yang disediakan pemerintah diharapkan akan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Kota Palembang memiliki keuangan daerah yang cukup potensial. Tabel 1.3 menunjukkan bahwa kota Palembang sudah dapat mengelola keuangannya sendiri

sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2000 pendapatan asli daerah hanya sebesar Rp.18,352 Miliar, atau hanya mengalami pertumbuhan sebesar -12,36%. Pertumbuhan pendapatan asli daerah tertinggi terjadi pada tahun 2001 sebesar 74,14%. Pendapatan asli daerah tahun 2004 sempat mengalami penurunan sebesar -3.05% dari tahun 2003. Tahun 2005 pendapatan asli daerah sebesar Rp.77,416 Miliar, terus mengalami peningkatan hingga tahun 2007 sebesar Rp.117,953 Miliar. Rata-rata pertumbuhan pendapatan asli daerah ini sebesar 22,7% (lampiran 7).

Tabel 1.3 menyajikan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah kota Palembang periode 1998 sampai 2007 beserta pertumbuhan dan kontribusinya :

Tabel 1.3
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang
Tahun 1998 - 2007

(dalam ribuan rupiah)

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan (%)	Kontribusi (%)
1998	18352028		17.87
1999	23262478	26.76	15.05
2000	20386806	-12.36	12.99
2001	35501298	74.14	9.22
2002	36037251	1.51	7.94
2003	63522968	76.27	11.61
2004	61586178	-3.05	10.07
2005	77416857	25.70	9.66
2006	89676046	15.84	9.56
2007	117953719	31.53	10.81

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Selatan Tahun 1998-2007

Pendapatan asli daerah yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun ini diharapkan memberikan kontribusi secara tepat, cepat dan terpadu kepada masyarakatnya. Kota Palembang dituntut tanggung jawabnya didalam pelaksanaan pembangunan daerah dimana dalam hal ini pemerintah daerah dapat menyediakan

anggaran/dana investasi yang sangat besar, maka salah satu sumber pendapatan daerah yang bisa digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan adalah dengan menggunakan dana pinjaman daerah, walaupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap menjadi tulang punggung tetapi paling tidak pinjaman daerah ini dapat mempercepat proses pembangunan yang dilaksanakan oleh daerah. Karena pinjaman daerah ini dapat digunakan untuk membiayai proyek yang bersifat *cost recovery* khususnya untuk kepentingan pelayanan masyarakat sehingga dapat meningkatkan pembangunan dan perekonomian daerah.

Pinjaman daerah ini dapat digunakan untuk membiayai proyek yang bersifat *cost recovery* dibenarkan atas dasar dua pertimbangan : (Abdul Halim, 2004: 123)

1. Dengan cara meminjam dana untuk menanam modal, pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan di wilayahnya, dibandingkan dengan jika kegiatan pembangunan hanya bergantung pada penerimaan berjalan;
2. Karena manfaat penanaman modal baru dapat dipetik setelah jangka waktu yang panjang, maka sudah sepatutnya jika biaya dipikul oleh mereka yang akan menikmati manfaatnya di masa datang.

Selain itu dengan cara meminjam, daerah dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk menggali Pendapatan Daerah Sendiri (PDS) yang pada gilirannya dapat meningkatkan kemampuan daerah membayar kembali pinjamannya. Namun untuk menentukan apakah suatu daerah tersebut layak atau tidak untuk melakukan pinjaman, diperlukan adanya analisis untuk menghitung kemampuan keuangan daerah. Karena pinjaman daerah ini berbeda dengan Pendapatan Asli Daerah seperti pajak dan restribusi, dalam pinjaman ini terdapat kewajiban dari pemerintah daerah untuk mengembalikan berupa angsuran pokok pinjaman yang

disertai dengan bunga, biaya administrasi dan denda, sehingga pemerintah daerah harus hati-hati apabila akan melakukan pinjaman.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka perumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kemampuan kota Palembang dalam melakukan pinjaman pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2007.
2. Berapakah besar pinjaman yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Palembang pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka secara umum tujuan dari penulisan ini adalah untuk :

1. Mengetahui kemampuan kota Palembang dalam melakukan pinjaman pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2007.
2. Menentukan besarnya pinjaman yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Palembang pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memperoleh manfaat, seperti :

1. Manfaat akademik, di mana penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para akademisi khususnya mahasiswa fakultas ekonomi mengenai kemampuan kota Palembang dalam melakukan pinjaman pada

tahun 1998 sampai dengan tahun 2007 dan mengetahui besarnya pinjaman yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah kota Palembang pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 .

2. Manfaat operasional, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam memecahkan masalah yang dihadapi untuk keadaan yang memenuhi kriteria yang sama dan memberikan pemikiran baru bagi penulis lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asngari, Imam. 2004. Modul Pengantar Ekonomi Makro. Forum HEDS Fakultas Ekonomi Unsri, Inderalaya
- Devas Nick, Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey, Roy Kelly. 1999, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia* (Terjemahan Masri Maris) UI – Press, Jakarta
- Elmi, Bachrul. 2004. Analisa Pembiayaan Pembangunan Prasarana Ekonomi di Kabupaten Musi Banyuasin 2003-2006. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, volume 8, nomor 2
- Guritno Mangkoesobroto. 1999. *Ekonomi Publik, Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Penerbit BPFE
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Jogjakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan (UPP) AMP YKPN
- Nataluddin. 2001, Kemampuan Keuangan Daerah dalam Melakukan Pinjaman Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 di Propinsi Jambi, *Tesis S2 Program Pasca Sarjana UGM*, Yogyakarta (Tidak dipublikasikan)
- Noviyanto, Haris. 2005. Analisis Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah dan Pinjaman Daerah di Kabupaten dan Kota DIY tahun 1994/1995-2003, skripsi sarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta
- Nugroho, Trilaksono. 2004. “Prospek Pemanfaatan Pinjaman Daerah”, *Jurnal*. Diakses dari <http://Publik.brawijaya.ac.id>
- Pakpahan, Arlen T. Diakses 21 April 2008. “Pembiayaan Defisit Anggaran di Pemerintahan Daerah”. <http://www.clgi.or.id>
- Patriastomo, Ikak G. 2000. ”Pinjaman Luar Negeri dan Kewenangan Pemerintah Daerah”. Tulisan disajikan dalam diskusi terbuka mengenai Desentralisasi sebagai upaya bagian dari Pembangunan Public Good Governance, Jakarta, 19 Oktober 2000
- Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor : 107 Tahun 2000. Diakses 28 April 2008. www.ri.go.id/produk_uu/produk2004/uu2004/uu33'04.htm
- Purwoko. 2005. “Analisis Peluang Penerbitan Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Daerah”. Paper ini telah diseminarkan dalam Diskusi Intern di lingkungan Bapekki Departemen Keuangan RI, pada tanggal 29 Agustus 2005
- Bappeda. 2006. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Muara Enim tahun 2006-2008

- Rijal, Khairul. 2007. Pinjaman Daerah Sebagai Alternatif Terakhir Pembiayaan Pembangunan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan Kota Langsa), tesis Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta
- Santoso, Rokhedi P. (2003) "Analisis Pinjaman Sebagai Potensi Pembiayaan Pembangunan Daerah: Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume VIII, No. 2, 147-158
- Suparmoko. 1986. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*. BPFE Yogyakarta
- Suwarno, Wahyu. 2001. Analisa Kemampuan Keuangan Daerah didalam Melakukan Pinjaman di Propinsi DKI Jakarta, *Tesis S2 Program Pasca Sarjana UGM*, Yogyakarta (Tidak dipublikasikan)
- Tadang, M. Ambar. 1984. *Ekonomi Pembangunan Problema Dasar dan Teori Pembangunan Ekonomi*. Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 dan telah direvisi melalui Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*, Departemen Dalam Negeri RI, Jakarta.
- Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan telah direvisi melalui Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*, Departemen Dalam Negeri RI, Jakarta
- Widjaja, HAW.2007. *Otonomi Derah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Yamane, Taro. 1973. *Statistics an Introductory Analysis*. Tokyo: Aoyama Gakuin University.